

URGENSI PENDIDIKAN DEMOKRASI DI SEKOLAH

Dedi Arianto

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Misbahul Ulum Gumawang
Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan
Email: dediarianto7@gmail.com

Abstract

By providing knowledge and understanding of three things to the younger generation, democracy education seeks to empower citizens to think critically and act democratically. These three things are: First, democracy is a social structure that best protects the rights of citizens. Second, democracy is a process that must be learned and cannot simply be imitated by other nations. Third, the effectiveness of changing democratic principles such as freedom, equality and justice as well as obedience to the democratic political system is very important for the survival of democracy. The goals of democratic education as mentioned above are in line with the goals of national education as stated in Law Number 20 of 2003 concerning The National Education System (Sisdiknas) in article 3 namely developing capabilities and forming dignified national character and civilization in the context of educating the life of the nation, aims to develop the potential of students to become human beings who believe and fear God Almighty, have noble character, are healthy, knowledgeable, and most importantly democratic.

Keywords: Urgency, Democracy Education, School

Abstrak

Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tiga hal kepada generasi muda, Pendidikan demokrasi berupaya memberdayakan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Ketiga hal tersebut adalah: *Pertama*, demokrasi merupakan struktur sosial yang paling melindungi hak-hak warga negara. *Kedua*, demokrasi adalah proses yang harus dipelajari dan tidak bisa begitu saja ditiru oleh bangsa lain. *Ketiga*, efektivitas mengubah prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan serta ketaatan pada sistem politik demokrasi sangat penting untuk kelangsungan demokrasi, Tujuan pendidikan demokrasi sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan yang terpenting berdemokrasi.

Kata Kunci: *Urgensi, Pendidikan Demokrasi, Sekolah*

A. PENDAHULUAN

Era reformasi di Indonesia merupakan era baru yang ditandai dengan perubahan di segala bidang kehidupan publik dan privat, termasuk pendidikan. Kondisi demikian merupakan akibat dari pemerintahan Orde Baru yang berpihak pada pemerintahan otoriter. Pusat menguasai semua bidang secara represif, termasuk bidang pertahanan, keamanan, sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Gagasan bahwa pendidikan adalah pendorong pertumbuhan tampaknya sudah mati dan terus berjalan. Alih-alih memaksakan pemikiran-pemikiran tertentu kepada anak didik untuk tujuan melestarikan kekuasaan, pendidikan harus lebih diprioritaskan untuk mencerdaskan generasi muda bangsa. Hal ini sesuai dengan bagaimana Orde Baru menetapkan kurikulum pada tahun 1984 dan 1994, dengan menggunakan buku teks sebagai alat doktrin. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan publikasi tersebut hanya memuat informasi yang salah dan memutarbalikkan realitas sosial. Demikian pula, ketika pemerintah mengamanatkan pembenahan P4, bukan menjadi lebih “mencintai”, melainkan lebih “sinis”¹. Tak dapat dipungkiri, sistem demokrasi Pancasila yang dianut oleh rakyat Indonesia, secara langsung bertentangan dengan matinya kebebasan berbicara, kreativitas, dan pengembangan pemikiran di bidang pendidikan.

Aspek lain dari demokrasi Indonesia menunjukkan bahwa ia belum sepenuhnya merasuki kesadaran dan pola pikir. Begitu juga dengan munculnya kekerasan politik dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah, seperti memandang perbedaan sebagai konflik, bertindak totaliter, atau bertindak anarki, sikap masyarakat terhadap isu kebebasan dan toleransi antar umat beragama

¹ Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi*. Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah, h.162

masih sangat jauh dari demokratis. Oleh karena itu, internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal, sangat penting untuk membangun masyarakat yang demokratis.

B. METODE

Metodologi penelitian dalam penelitian ini merupakan kajian pustaka. Jenis informasi yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian. Informasi yang dikumpulkan disusun menjadi sub-bab untuk membahas rumusan masalah penelitian. 1) Memiliki pemahaman umum tentang topik penelitian diperlukan untuk melakukan metode pengumpulan data. 2) mencari bahan untuk memperkuat subjek. 3) Memperkuat topik penelitian. 4) Menemukan sumber bacaan yang diperlukan, mengklasifikasikannya, dan mencarinya. 5) membaca dan mencatat untuk penelitian. 6) Telusuri dan menjelaskan lebih lanjut bahan bacaan. 7) Sortir bahan bacaan lalu mulai menulis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis isi. Pengecekan antar literatur dilakukan, membaca ulang literatur, dan memperhatikan komentar guna menjaga proses review serta mencegah dan mengatasi misinformasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan menanamkan nilai-nilai demokrasi, pendidikan demokrasi pada dasarnya membantu peserta didik tumbuh lebih dewasa dalam kehidupan demokrasi sehingga perilakunya mencerminkan kehidupan yang demokratis. Demokrasi sebagai konsep dan demokrasi sebagai praktik perlu ditonjolkan dalam pendidikan demokrasi. Sebagai sebuah konsep membahas pengertian, makna, dan sikap perilaku yang tergolong demokratis, namun pada kenyataannya demokrasi telah berkembang menjadi sebuah sistem. Merupakan tanggung jawab guru untuk mensosialisasikan kedua tingkatan ini dalam konsep dan fraksisnya sehingga siswa dapat memahami demokrasi dan mengambil bagian di dalamnya.

Mengutip *Wikipedia, the free encyclopedia* yang mendefinisikan pendidikan demokrasi sebagai paradigma pembelajaran dan administrasi sekolah yang menawarkan kesempatan bagi siswa, guru, dan staf pendukung untuk terlibat secara bebas dan setara dalam kegiatan sekolah. Keputusan di sekolah demokrasi dibuat dengan masukan dari mereka yang akan terkena dampak². Berdasarkan definisi pendidikan demokrasi, dapat diidentifikasi beberapa komponennya, antara lain: *Pertama*, kemampuan kurikulum untuk memberikan keleluasaan bagi beberapa sekolah dan daerah yang mereka butuhkan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan dan kebutuhan setempat tanpa mengorbankan fokusnya pada kepentingan nasional dan internasional. Kurikulum menggambarkan tersedianya topik-topik yang menumbuhkan lingkungan demokratis dalam proses belajar mengajar, yang kemudian dapat menanamkan prinsip-prinsip demokrasi pada siswa.

Kedua, tidak ada persyaratan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan lainnya menggunakan seperangkat bahan ajar tertentu; mereka bebas menggunakan sumber daya apa pun yang mereka pilih. Idealnya mereka diperbolehkan memilih buku dan media yang paling mereka hargai sebagai sumber belajar mereka. Menyadari bahwa setiap siswa adalah unik dengan berbagai kelebihan dan keterbatasan yang memungkinkan partisipasi aktif, materi pembelajaran itu sendiri dirancang dengan tujuan individu sebagai subjek bukan sebagai objek pengajaran. *Ketiga*, pendidikan demokratis menawarkan siswa dukungan terbaik. Dengan menanggapi dan merangkul keragaman, menghormati perspektif siswa, tidak memaksakan kehendak mereka, dan membina lingkungan belajar yang demokratis, guru dan pegawai sekolah harus bertindak secara demokratis. Implementasi nilai-nilai demokrasi dalam praktik pendidikan atau belajar mengajar juga didukung oleh sarana dan prasarana pendidikan. Misalnya, perpustakaan kelas dan sekolah harus menjadi komponen penting dari pengajaran dan pembelajaran di kelas. Sekolah atau lembaga pendidikan harus mampu menyediakan lingkungan belajar yang dapat memenuhi kebutuhan biologis

² Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, h. 25

(makanan, minuman, rasa aman, dan tempat istirahat), kebutuhan psikologis, dan kebutuhan sosial karena anak seharusnya memiliki beragam kebutuhan sebagai individu. (komunikasi dan interaksi dengan sesama manusia).

Keempat, penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler mempunyai tujuan tertentu dan tidak semata-mata berfungsi untuk melengkapi kurikulum. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan rasa kepemimpinan, kemampuan pengambilan keputusan yang mandiri, kemampuan untuk bekerja sama, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang damai dan aman. Kelima, semua pihak yang berkepentingan terlibat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang manajemen sekolah. Sekolah membuka pintu, memberikan kebebasan, dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan dari semua pihak atau pemangku kepentingan yang berkepentingan, khususnya siswa dan orang tua. Orang tua siswa ikut serta dalam membuat kurikulum sekolah dan semua programnya selain membayar biaya semester atau uang sekolah.

Urgensi Pendidikan Demokrasi

Urgensi pendidikan demokrasi di sekolah adalah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui prakarsa peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, serta terlaksananya demokratisasi pendidikan dengan dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal. Pendidikan demokrasi tidak hanya lebih berpihak pada pelaksanaan pembelajaran bermakna di kelas dan di sekolah, tetapi juga memberikan jalan kepada siswa untuk mempraktekkan demokrasi. Pengalaman ini akan menjadi krusial bagi mahasiswa untuk bekal di masa depan dalam bermasyarakat, bernegara, dan bernegara³. UU Sisdiknas mendukung reformasi demokrasi yang sejalan dengan pendidikan demokrasi, sehingga sangat penting untuk mengimplementasikan pendidikan demokrasi dalam kegiatan pembelajaran dan penyelenggaraan sekolah.

³ Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama, h. 27

Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan diselenggarakan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif dengan menjaga hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, dan nilai kebangsaan. Penegasan bahwa pendidikan disusun secara demokratis, yang berarti otoritas pengelolaan lokal dan regional serta lembaga-lembaga yang mendukungnya akan lebih terlibat daripada pemerintah federal, adalah ide kunci dari paragraf ini. Selain itu, Pasal 9 menentukan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengambil bagian dalam penciptaan, administrasi, pemantauan, dan penilaian prakarsa pendidikan. Partisipasi masyarakat dalam dewan pendidikan daerah atau komite sekolah dapat diwujudkan. Komite sekolah berhak mengambil bagian dalam menyusun rencana pendidikan, mulai dari perencanaan makro hingga kebijakan tentang restrukturisasi kurikulum.

Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Ada banyak variasi dan interaksi di sekolah. Siswa bersekolah dan berasal dari berbagai latar belakang. Guru berkolaborasi dengan berbagai orang, termasuk akademisi, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Alumni dari sekolah yang tersebar di berbagai bisnis dan organisasi swasta berkomunikasi dengan guru dan siswa di sekolah. Dalam keadaan seperti itu, sekolah memiliki potensi untuk berfungsi sebagai laboratorium yang berguna untuk mengajarkan tentang demokrasi dan mendorong tatanan sosial yang demokratis.

Dengan fokus pada masa depan negara dan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, persaudaraan, persatuan, kebangsaan, keragaman, multikulturalisme, nasionalisme, dan demokrasi, pendidikan demokrasi diharapkan dapat menghasilkan warga negara dengan kualitas sebagai berikut: keberanian untuk mengadopsi yang positif sikap untuk menegakkan pilar-pilar demokrasi. Persoalan kedua adalah bagaimana mengimplementasikan pendidikan demokrasi dalam pendidikan formal, khususnya di sekolah, baik di tingkat kelas maupun lembaga. Lingkungan kelas yang terbuka dan menerima segala variasi, termasuk sikap dan gagasan siswa, diperlukan untuk penanaman prinsip-prinsip demokrasi

di tingkat kelas. Lingkungan kelas yang santai dan terbuka sangat ideal untuk mendorong sosialisasi prinsip-prinsip demokrasi karena menumbuhkan budaya demokrasi yang membuat pembelajaran menjadi aktif dan menarik.

Menurut Zamroni (2011), unsur-unsur lingkungan kelas yang demokratis meliputi: (1) kesempatan yang sama dan merata bagi semua siswa; (2) nilai sudut pandang yang beragam dalam membina komunitas kelas; (3) komunikasi yang jelas tentang semua pilihan untuk memajukan minat siswa kepada semua siswa; dan (4) kemampuan siswa membentuk perkumpulan atau kelompok di luar kelas. Sebaliknya, kelas yang tidak demokratis menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut: (a) iklim kelas yang kaku dan otoriter; (b) aktivitas siswa pasif, dan waktu didominasi oleh guru; (c) membatasi kesempatan diskusi, dan tidak pernah membahas isu-isu kontroversial; (d) kesempatan yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada bagi anggota kelas untuk membuat keputusan; dan (e) anggota kelas sering mengeluh tanpa berusaha mencari solusi atas masalah yang ada.

Perlu adanya perubahan kegiatan pembelajaran di kelas agar nuansa demokrasi menjadi lebih mapan dan bermanfaat. Oleh karena itu, guru harus inovatif dalam menggunakan strategi atau model pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengangkat topik atau masalah yang kontroversial untuk memancing pemikiran kritis siswa dan memberikan lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dan mengungkapkan pendapat seseorang. Guru juga harus bersikap toleran dan egaliter agar dapat mengakomodasi segala perbedaan selama pembelajaran. Dengan menciptakan dan memanfaatkan model-model pembelajaran seperti model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran berbasis masalah, dapat tercapai nuansa demokrasi dalam kegiatan pendidikan (PBM).

Pendidikan demokrasi mencakup semua segi pendidikan, termasuk unsur kelembagaan, selain proses pembelajaran di kelas. Sebuah sekolah memenuhi syarat sebagai sekolah demokratis dalam kerangka institusional jika memiliki kualitas sebagai berikut: *Pertama*, manajemen selalu dibangun berdasarkan konsensus. Apapun program yang dibuat dan dilaksanakan harus mendapat dukungan dari seluruh komponen sekolah. *Kedua*, organisasi yang beranggotakan

komunitas profesional khususnya yang memiliki pengetahuan teknis dan otoritas di bidangnya harus mengadopsi pendekatan demokratis. *Ketiga*, mereka yang bergabung dengan organisasi selama masa pendidikan dan tahun pertama bekerja bertanggung jawab untuk membangun etos, budaya, dan kebiasaan dalam organisasi. *Keempat*, sebuah komite daripada sekolah yang menggunakan kemampuan kepemimpinannya untuk membuat keputusan sendiri tentang berbagai kebijakan penting yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan tersebut. *Kelima*, polarisasi organisasi yang disebabkan oleh perbedaan pendapat sedapat mungkin dihindari dan semua keputusan dicapai melalui kompromi atau konsensus.

Menurut Beaned dan Apple (1995), yang dikutip oleh Rosyada⁴, syarat-syarat berikut harus diciptakan untuk menciptakan sekolah yang demokratis: (a) Jalur gagasan dan informasi harus terbuka bagi setiap orang untuk memperolehnya informasi sebaik mungkin. (b) Meningkatkan kepercayaan diri orang dan organisasi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah akademik. (c) mengungkapkan kritik sebagai konsekuensi dari analisis sambil mempresentasikan evaluasi konsep, masalah, dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah. (d) Menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan isu-isu yang mempengaruhi publik. (e) Menghormati kesusilaan manusia, hak kepemilikan pribadi, dan hak minoritas. (f) Pengetahuan bahwa demokrasi masih harus dikembangkan agar mampu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia karena demokrasi yang telah terbangungudang belum mewujudkan cita-cita demokrasi. (g) Adanya organisasi yang dapat terus memajukan dan membudayakan gaya hidup demokratis.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), model manajemen yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan mendorong partisipasi langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dan sebagainya). meningkatkan mutu pendidikan sekolah berdasarkan kebijakan nasional dan peraturan perundang-

⁴Dede Rosyada. 2004. *Paradigma pendidikan demokratis*. Jakarta: Prenada Media, h.16

undangan yang berlaku, dapat mengakomodasi iklim demokrasi dalam aspek kelembagaan sekolah.

Prinsip inti manajemen berbasis sekolah (MBS), menurut Veithzal & Sylviana adalah otonomi, fleksibilitas, dan partisipasi untuk mencapai tujuan mutu sekolah⁵. Konsep otonomi dapat dipahami sebagai kewenangan/kemerdekaan, yaitu kemandirian dalam kemampuan seseorang untuk mengendalikan dan mengatur diri sendiri serta mandiri/berdiri sendiri. Oleh karena itu, otonomi sekolah adalah kemampuan sekolah untuk mengelola kepentingan warga sekolah sesuai dengan prakarsa sendiri berdasarkan cita-cita warga sekolah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang ada.

Dalam rangka peningkatan mutu sekolah, fleksibilitas dapat diartikan sebagai kebebasan yang diberikan kepada sekolah untuk mengelola, mempekerjakan, dan memberdayakan sumber daya seefektif mungkin. Dengan adanya kebebasan ini, sekolah akan lebih lincah dan tidak perlu menunggu perintah dari atas untuk mengelola, mempekerjakan, dan memberdayakan sumber daya yang ada. Dengan begitu, sekolah akan lebih tanggap dan cepat mengatasi setiap permasalahan yang muncul.

Lingkungan yang lebih inklusif di mana personel sekolah (guru, siswa, dan staf) dan masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam semua aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan dan evaluasi, diharapkan dapat meningkatkan standar pengajaran. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa jika seseorang terlibat aktif (berpartisipasi) dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ia akan merasakan “rasa memiliki” terhadap lembaga tersebut dan berkomitmen penuh untuk mencapai tujuannya.

Penting untuk diingat bahwa budaya sekolah mempengaruhi bagaimana nilai-nilai demokrasi diinternalisasikan di kelas. Sekelompok nilai dan pandangan

⁵Veithzal & Sylviana. 2009. *Education management*. Jakarta: PT. RajaGrafinfo Persada, h.163

dunia bersama siswa, termasuk moto sekolah mereka, membentuk budaya mereka. Penyesuaian yang dilakukan terhadap perubahan zaman yang cepat tidak dapat dipisahkan dengan perubahan budaya sekolah. Konsekuensinya, harus diciptakan dengan menggunakan strategi yang tepat. Menurut Zamroni (2011), ada beberapa taktik untuk menciptakan budaya sekolah yang baik, antara lain: (1) memastikan tujuan, sasaran, dan target pengembangan budaya tersebut jelas dan konkret; (2) memastikan bahwa sekolah dan orang tua siswa bekerja sama untuk mengembangkan budaya; dan (3) memastikan bahwa semua guru menyadari peran kritis dan tanggung jawab mereka dalam menerapkan dan memelihara budaya. Dalam proses mempraktikkan pembelajaran, guru menekankan kemampuan berpikir kritis, kerja sama tim, dan pengambilan keputusan siswa. Selain itu, budaya sekolah harus digunakan untuk meningkatkan prestasi siswa. Budaya sekolah merupakan fungsi pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lembaga-lembaga di mana kepala sekolah dan guru memiliki kontrol langsung terhadapnya.

Tujuan Pendidikan Demokrasi

Pada dasarnya, pendidikan demokrasi melibatkan sosialisasi prinsip-prinsip demokrasi sehingga warga negara dapat merangkul dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Sebagai bagian dari sosialisasi politik negara terhadap penduduknya, nilai-nilai demokrasi disosialisasikan melalui pendidikan demokrasi. Sosialisasi prinsip-prinsip demokrasi dilakukan secara terencana, terstruktur, tertata dengan baik, terutama melalui pendidikan formal, sesuai dengan pengertian pendidikan sebagai proses yang disadari dan terencana. Untuk usia yang lebih muda, pendidikan demokrasi dilaksanakan melalui pendidikan formal, dalam hal ini sekolah. Melalui promosi informasi, kesadaran, dan prinsip-prinsip demokrasi, sistem pendidikan memainkan peran penting dalam menjamin kelangsungan sistem politik demokrasi.

Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tiga hal kepada generasi baru, pendidikan demokrasi berupaya memberdayakan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Ketiga hal tersebut adalah:

Pertama, demokrasi merupakan struktur sosial yang paling melindungi hak-hak warga negara. *Kedua*, demokrasi adalah proses yang harus dipelajari dan tidak bisa begitu saja ditiru oleh bangsa lain. *Ketiga*, efektivitas mengubah prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan serta ketaatan pada sistem politik demokrasi sangat penting untuk kelangsungan demokrasi⁶.

Tujuan pendidikan demokrasi sebagaimana tersebut di atas sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pada pasal 3 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan yang terpenting berdemokrasi.

D. KESIMPULAN

Pendidikan demokrasi adalah paradigma pembelajaran dan administrasi sekolah yang memberikan kesempatan kepada instruktur, administrator, dan siswa untuk terlibat secara bebas dan setara dalam kegiatan pendidikan. Keputusan di sekolah demokrasi dibuat dengan masukan dari mereka yang akan terkena dampak. Dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tiga hal kepada generasi baru, pendidikan demokrasi berupaya memberdayakan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis. Ketiga hal tersebut adalah: *Pertama*, demokrasi merupakan struktur sosial yang paling melindungi hak-hak warga negara. *Kedua*, demokrasi adalah proses yang harus dipelajari dan tidak bisa begitu saja ditiru oleh bangsa lain. *Ketiga*, keberhasilan transformasi nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan serta ketaatan pada sistem politik demokrasi sangat penting bagi kelangsungan demokrasi. Kebutuhan akan pendidikan demokrasi di sekolah mendesak tidak hanya dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui prakarsa

⁶Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing, h.17

peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan serta tercapainya demokratisasi pendidikan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih efektif, tetapi juga sebagai sarana untuk menyediakan siswa dengan platform untuk mengalami kehidupan demokrasi. Pengalaman ini sangat penting untuk digunakan siswa nantinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai demokrasi harus dikembangkan dalam masyarakat pendidikan, khususnya pada pendidikan formal, agar demokrasi dapat terwujud. Semua aspek pendidikan, termasuk aspek pembelajaran dan kelembagaan, harus menginternalisasi pertumbuhan dan penanaman prinsip-prinsip demokrasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Dede Rosyada. 2004. *Paradigma pendidikan demokratis*. Jakarta: Prenada Media.
- Depdiknas. 2003. *Undang-Undang RI No. 20. Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Veithzal & Sylviana. 2009. *Education management*. Jakarta: PT. RajaGrafinfo Persada.
- Zamroni. 2001. *Pendidikan untuk demokrasi*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan demokrasi dalam transisi*. Yogyakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan demokrasi pada masyarakat multikultural*. Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.